



Accountability and Transparency in the Management of Village Funds in Sukajaya Village, Kedurang Iir District, South Bengkulu Regency

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Iir, Kabupaten Bengkulu Selatan



Bakirman .B^{*a}
Heru Purnawan^b
Mulyadi^c

Article history:

Submitted: 16-06-2024

Revised: 27-06-2024

Accepted: 30-06-2024

Keywords:

Transparency, Accountability, Village Fund Management, Sukajaya Village.

Abstract

This study aims to identify and evaluate the level of accountability and transparency in the management of village funds in Sukajaya Village, Kedurang Iir Subdistrict, South Bengkulu Regency. The goal is to enhance the effectiveness and integrity of the village fund management and to provide recommendations for improvements to the relevant parties and the village community. This research employs a qualitative descriptive method to investigate accountability and transparency in the management of village funds in Sukajaya Village, Kedurang Iir Subdistrict, South Bengkulu Regency. Data collection techniques include documentation and in-depth interviews with various informants such as the Village Head, village apparatus, members of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and other villagers. It also utilizes descriptive analysis to systematically organize and interpret the data.

The conclusion of this study indicates that although the accountability and transparency of the Village Fund management in Sukajaya Village are quite good, there are several areas that need improvement. These include planning, implementation and supervision, accountability, accessibility of information to the community, community participation in decision-making, as well as reporting and complaints related to the use of the Village Fund.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Fund Management, Sukajaya Village*

^a Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

^b Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

^c Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan integritas pengelolaan dana desa serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pihak terkait dan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menginvestigasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam kepada berbagai informan seperti Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa lainnya, serta menggunakan analisis deskriptif untuk mengorganisir dan menginterpretasi data secara sistematis. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Sukajaya sudah cukup baik, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pertanggungjawaban, keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta pelaporan dan keluhan terkait penggunaan Dana Desa.

Kata kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Desa Sukajaya*

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2024.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Bakirman .B*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email address: bakirmanb@gmail.com

1. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam (Purnawan, 2021). Desa memerlukan pendapatan yang vital untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari APBN, hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD, hibah, sumbangan, dan pendapatan sah lainnya (Purnawan, 2020). Dana Desa (DD) dari APBN dialokasikan untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Purnawan, Triyanto, et al., 2022).

Peraturan terkait pengelolaan keuangan desa mengharuskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran (Purnawan et al., 2023). Pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan untuk meminimalkan risiko korupsi, ketidaktransparanan, dan kurangnya akuntabilitas. Transparansi merujuk pada kebijakan pemerintah untuk secara terbuka memberikan informasi pengelolaan sumber daya publik, sementara akuntabilitas adalah kewajiban penyedia layanan publik untuk menjelaskan dan menjawab langkah-langkah dan hasil kinerjanya (Triyanto et al., 2021).

Desa Sukajaya, yang mayoritas penduduknya adalah petani, menerima pendapatan desa sebesar Rp 1.506.852.210 pada tahun 2023, terdiri dari ADD, DD, dan BHPR. Namun, informasi tentang APBDes hanya tersedia melalui spanduk di kantor desa. BPD Desa Sukajaya kurang berperan aktif dalam penyaluran aspirasi dan perancangan program desa karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan anggotanya. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah juga terbatas.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sukajaya dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat desa.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukajaya, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukajaya, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan.

Penelitian ini mengacu pada prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* yaitu adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Indikator penilaian untuk menilai transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa di desa Sukajaya menggunakan pendekatan indikator penilaian akuntabilitas menurut (Ramdhani, 2016) dan pendekatan indikator transparansi menurut Sedarmayanti dalam (Sedarmayanti, 2012). Indikator akuntabilitas penggunaan dana desa yaitu:

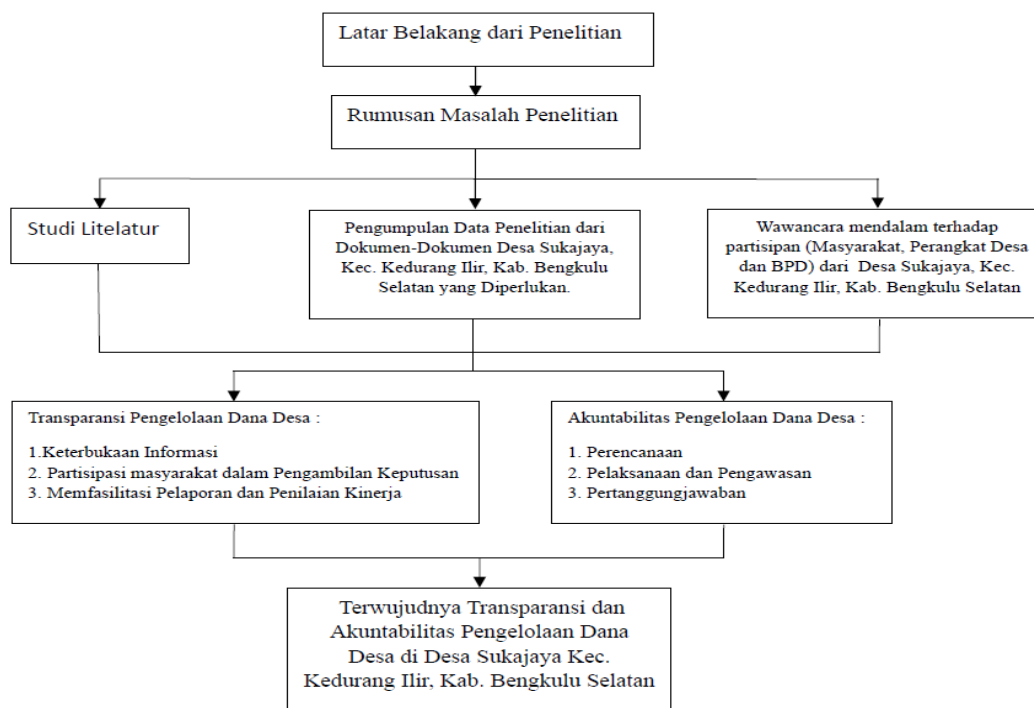
- a. Adanya perencanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan masyarakat dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat,
- b. Adanya Pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan sudah sesuai,
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang sesuai;

Sedangkan indikator transparansi penggunaan dana desa yaitu:

- a. Keterbukaan Informasi;
- b. Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan;
- c. Memfasilitasi pelaporan dan penilaian kinerja.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif (Purnawan, Noviyanto, et al., 2022). Menurut Sugiyono dalam (Purnawan et al., 2024) Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian dilakukan di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, menggunakan data primer dan sekunder dari wawancara dan dokumentasi untuk menilai akuntabilitas dan transparansi (Sugiyono, 2016) pengelolaan Dana Desa, dengan analisis data dilakukan secara sistematis dan interpretatif untuk memahami makna dan interaksi sosial yang terkait (Sugiyono, 2015). Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini:



3. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sukajaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat ini desa Sukajaya di pimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Edi Yanto. Desa ini memiliki luas wilayah seluas 425 Ha dengan sebelah utara berbatasan dengan desa Air Sulau, Sebelah timur berbatasan dengan desa Sulawangi, Kab. Kaur, Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan desa Lubuk Ladung. Desa ini sendiri merupakan hasil pemekaran dari desa Air Sulau pada tahun 2005. Menurut data Demografi desa Sukajaya (2024), jumlah penduduk di desa Sukajaya saat ini adalah sebanyak 879 orang. Sementara jumlah Kepala Keluarga (KK) tercatat sebanyak 272 KK. Usia penduduk mayoritas di desa Sukajaya di dominasi pada rentang umur 16-60 tahun dengan mata pencaharian dominan adalah sebagai petani. Sedangkan rata-rata Pendidikan terakhir dari masyarakat desa Sukajaya adalah tamatan SLTP/Sederajat dan tamatan SLTA/Sederajat.

b. Pembahasan penelitian

Peneliti telah melakukan pengumpulan data yang komprehensif dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Sukajaya.

Penelitian dimulai dengan melakukan persiapan instrumen wawancara yaitu dengan menyusun pedoman wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan ini harus mencakup indikator-indikator penilaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang diadopsi dari Sari dan Wahidahwati (2018) serta Sedarmayanti (2009).

Peneliti kemudian mengidentifikasi informan yang memenuhi kriteria yaitu (1) memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa, (2) mewakili berbagai kelompok atau perspektif yang ada di desa, dan (3) menyediakan serta bersikap terbuka terhadap informasi. Informan yang memenuhi kriteria ini meliputi Edi Yanto (Kepala Desa), Aditya Laksana, S.Kom. (Kepala Urusan Keuangan), Ribut Triana (Kasi Pemerintahan), Musar

Mares (Kasi Kesejahteraan Rakyat), Sugianto dan Ichwan (Ketua BPD dan anggotanya), Usirta dan Marsudi (tokoh masyarakat), serta Bibit Trimansyah (masyarakat umum) di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Setelahnya, peneliti melaksanakan wawancara mendalam dengan informan-informan yang memenuhi kriteria. Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya. Selama wawancara, dilakukan perekaman dan pencatatan poin-poin penting. Peneliti juga mendokumentasikan para informan sebagai bukti pertanggungjawaban atas wawancara yang dilakukan.

Langkah berikutnya, peneliti menganalisis data wawancara dengan mengubah rekaman wawancara menjadi teks tertulis untuk memudahkan proses analisis. Hasil wawancara diorganisir berdasarkan pertanyaan yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi di Desa Sukajaya. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan para informan.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukajaya

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, dan akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban. Penelitian ini menyesuaikan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a) Adanya perencanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan masyarakat dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
- b) Adanya pelaksanaan dan pengawasan yang sesuai.
- c) Adanya laporan pertanggungjawaban yang sesuai.

Pertama, dalam hal perencanaan, Desa Sukajaya telah cukup baik dalam melibatkan masyarakat melalui musyawarah seperti Musyawarah Desa (MUSDes), musyawarah penetapan RKPDes, dan musyawarah RKPDes. Namun, partisipasi masyarakat luas masih terbatas pada perwakilan tertentu.

Kedua, pelaksanaan dan pengawasan menunjukkan bahwa proyek-proyek yang didanai Dana Desa telah berjalan sesuai rencana yang disepakati. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih minim.

Ketiga, meskipun ada laporan pertanggungjawaban yang diajukan kepada BPD dan Bupati, laporan ini tidak dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga transparansi belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, Desa Sukajaya perlu lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukajaya

Transparansi dalam pemerintahan berarti mengungkapkan informasi material secara berkala kepada masyarakat untuk memastikan mereka dapat mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Berdasarkan Sedarmayanti (2009), indikator transparansi pengelolaan keuangan desa meliputi keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memfasilitasi pelaporan serta penilaian kinerja. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator berikut:

- a) Mekanisme yang menjamin keterbukaan informasi dalam berbagai proses dan keputusan terkait penggunaan Dana Desa.
- b) Mekanisme yang memfasilitasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa.
- c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan atau keluhan terkait penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan indikator ini, transparansi di Desa Sukajaya melibatkan:

Pertama, mekanisme keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, seperti melalui musyawarah desa dan Spanduk APBDes. Namun, beberapa warga merasa informasi yang tersedia masih kurang memadai, dan beberapa tidak mengetahui informasi tersebut karena tidak diundang dalam musyawarah.

Kedua, mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes), namun partisipasi masih terbatas pada perwakilan tertentu, dan masyarakat umum merasa kurang terlibat.

Ketiga, mekanisme pelaporan atau keluhan mengenai Dana Desa yang saat ini hanya memungkinkan pelaporan langsung kepada Pemerintah Desa atau BPD. Ada kebutuhan untuk sistem pelaporan anonim agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan tanpa rasa takut konflik.



Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Sukajaya telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam transparansi, tetapi perlu memperbaiki beberapa aspek, termasuk menyediakan informasi yang lebih rinci, memperluas partisipasi masyarakat dalam musyawarah, dan membentuk sistem pelaporan yang lebih aman dan inklusif.

4. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di desa Sukajaya dapat dikatakan sudah cukup baik. Akan tetapi ada beberapa point penting yang harus menjadi fokus perbaikan dari desa Sukajaya. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini:

1. Fokus perbaikan dari peneraparan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukajaya, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:
 - a) Perencanaan: Meski perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada perwakilan tertentu. Pemerintah desa perlu lebih melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses ini.
 - b) Pelaksanaan dan Pengawasan: Pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana, tetapi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat minim. Pemerintah desa seharusnya melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pengawasan penggunaan Dana Desa.
 - c) Pertanggungjawaban: Laporan pertanggungjawaban ada, namun tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dengan menyampaikan laporan secara terbuka kepada masyarakat. Menyelenggarakan lebih banyak musyawarah desa yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan.
2. Fokus perbaikan dari peneraparan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukajaya, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:
 - a) Keterbukaan Informasi: Pemerintah Desa Sukajaya telah melakukan upaya untuk memastikan keterbukaan informasi melalui musyawarah desa dan Spanduk APBDes. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa informasi yang disediakan belum memadai dan menginginkan akses yang lebih lengkap, termasuk dokumen rinci mengenai penggunaan Dana Desa.
 - b) Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan: Musyawarah Desa secara berkala telah dilaksanakan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat. Namun, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada perwakilan tertentu. Perluasan kesempatan partisipasi agar melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan terkait Dana Desa.
 - c) Pelaporan dan keluhan terkait penggunaan Dana Desa: Meskipun ada mekanisme pelaporan dan keluhan terkait penggunaan Dana Desa, banyak masyarakat merasa enggan untuk melaporkan masalah karena khawatir akan konflik dengan Pemerintah Desa. Oleh karena itu, perlu dibentuk sistem pelaporan yang anonim dan aman serta melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang hak mereka dalam melaporkan masalah.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Desa: Diharapkan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan, dapat memperbaiki keterbukaan informasi dan Menyediakan mekanisme atau fasilitas khusus untuk pelaporan dan penilaian kinerja pemerintah desa. Sehingga pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan masyarakat desa.
2. Bagi penelitian selanjutnya: penelitian selanjutnya diharapkan semoga dapat menggunakan metode analisis yang berbeda dengan sektor yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih baik dan lebih banyak supaya dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

5. Daftar pustaka

- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Mardianto, Noviyanto, H., & Darmawi, E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADANG BINJAI KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 288–296.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Purnawan, H., Suwanto, K., Dani, R., & Aprianty, H. (2024). *Evaluation of Samsat Virtu Tax Payment Service Innovations in Increasing Original Regional Income in Bengkulu City*. 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.9897>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Vol 11*(January), 1–12.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance: Pemerintahan yang baik*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2015). *MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF*. CV. ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. (p. 118).
- Triyanto, D., Purnawan, H., Saputra, B., Padang, U. N., Governance, G., Publik, P., Bengkulu, K., Governance, G., Service, P., & City, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu Application of Good Governance Principles in Public Services At the Betungan Community Health Center, Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*.

